BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun anggaran 2001 merupakan peluang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sesuai dengan hasil penelitian serta evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD), hanya beberapa daerah yang tergolong kaya yang mampu membiayai sendiri proyek-

proyek pembangunannya.Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan.

Tujuan meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek (Nugroho, 2012). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan,

dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan konsentrasi dan tugas pembantuan. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan insfratuktur yang ada oleh perekonomian di daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul kontribusi dana perimbangan

terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2021. Rumusan masalah adalah bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kontribusi dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap pemerintah daerah. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

Kesejahteraan suatu negara pada umumnya ditentukan oleh beberapa bentuk faktor dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana dana perimbangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan yang mana kedua variabel ini menjadi salah satu tolak ukur kesejahtraan masyarakat. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan kedua variabel ini saling berhubungan negatif yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pendapatan masyarakat akan menurun.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan juga merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang berkembang dalam usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan penduduknya.

Penelitian akan dikaji secara lebih lanjut mengenai hubungan dan keterkaitan antara variabel yang ada dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencapai gelar sarjana ekonomi (S1), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembanguana Universitas muhammadiya Pare Pare.
2. Mengacu pada masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015-2020

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan menjadi suatu kajian ilmiah khususnya dalam kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Praktis

   Hasil ini di harapkan menjadi sumbangan saran kepada semua pihak khususnya kepada daerah Kabupaten Sidenrang Rappang.

3. Manfaat Bagi Peneliti

   Memberikan tambahan informasi dan data bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di berbagai Kabupaten/kota

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (permendagri Nomor 13 tahun 2006). Dengan demikian APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kegiatan program dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Negara Otonom Daerah RI dan PAU-SEU GM, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karna itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencermikan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorentasi kepentingan dan akuntabilisasi public. Suatau anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayagunan dan hasilnya guna, Riadi (2012).

Aspek penting dari pemerintah daerah yang harus di atur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. anggaran daerah yang tercermin dalam APBD merupakan

instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan afektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menetukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bentuk pengambilang ke putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja.

1. Pengertian dana perimbangan

Berdasarkan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi” Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiscal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a). Dana Bagi Hasil

Pipin Syarifin (2005). Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkan pelaksanaan desentaralisasi.

Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dari kekayaan

daerah Dimana Menurut Pasal 11 ayat 1 UU No 33 Tahun 2004. Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : a.) Pajak bumi dan bangunan, b.) Bea pengelolahan Hak atas Tanah dan bagunan (BPHTB), c.) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak. Orang Pribadi Negeri dan PPH pasal 2 Undang-Undang No 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari. a.) Kehutanan b.) Pertambangan umum, c.) Perikanan, d.) Pertambangan Minyat Bumi, e.) Pertambangan Gas Bumi

Proporsi Dana Bagi Hasil Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut. a.) Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% untuk Daerah meliputuh 16,2% untuk Daerah Provensi yang bersangkutan dan disalurhkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provensi untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan 9% untuk Biaya Pemungutan.

Sedangkan 10% bagi pemerintah dan penerimaan PBB di bagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota dan didadasrkan atas dasar realisasi penerimaan PBB Tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 65% dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan sebesar 35% dibagi sebagai intense kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi

tahun sebelumnya. Bea Pengelolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB sebesar 80% dengan rincian 16% untuk Daerah Provensi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provensi, dan 64% untuk daerah kabupaten dan kota penghasilan disalurhkan ke Rekening Kas Umum Daerah,

Sedangkan 20% bagi pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagi dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. c.) Pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 Dana Bagi Hasil penerimaan PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri dan PPH pasal 21 merupakan bagian daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provensi dan kabupaten/kota dimana 60% dan untuk kebupaten/kota untuk Provensi. a.) Kehutanan, Pemerintah dan sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan iuran hak perusahaan. Hutan (IHPH) dan Provensi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dari 60% untuk daerah sedangkan pemerintah yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah 40% untuk daerah. b.) Pertambangan Umum Dana Bagi Hasil dari pemerintah pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. c.) Perikanan Dana Bagi

Hasil dari penerimaan perikanan diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 80% untuk seluruh kabupaten dan kota. c.) Pertambangan dan Minyat Bumi Penerimaan pertambahan minyak dan bumi yang dibagi ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pengutan lainnya dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah 15,5% untuk daerah.

Dana Bagi Hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% untuk kebupaten dan kota penghasilan, 6% dibandingkan untuk kebupaten dan kota lainnya dalam provensi yang bersengkutan sedangkan sisanya dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah yang sebesar 0,5% dilokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, di mana 0,1% dibagi untuk provensi yang bersangkutan, 0,2% dibagi untuk kebupaten dan kota penghasilan 0,2% dibagi untuk kebupaten lainnya dalam provensi yang bersangkutan. d.) Pertambangan Gas Bumi Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya 30,5% untuk daerah.

Dana Bagi Hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah

sebesar 30% dibagi dengan pertambangan 6% dibagi untuk provensi yang bersangkutan 12% dibagi untuk kebupaten/kota penghasilan, dana 12% di bagi untuk kebupaten/kota dalam provensi bersangkutan. Sedangkang sisa dana bagi hasil dari pertambangan gas bumi untuk daerah yang sebesar 0,5%, dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagi untuk provensi yang yang bersangkutan 0,2% dibagi untuk kebupaten/kota penghasilan 0,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provensi yang bersangkutan.

Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan Negara bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah 80% untuk daerah. Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk provensi yang bersangkutan 32% untuk kebupaten/kota lainnya dalam provensi yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentaralisasi DAU dibagi pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dan pemerintah daerah memanfaatkan PAD.

Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “Blog Grant” yang berati, pengunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaannya otonom daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provensi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pad

a APBN. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk memadai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentaralisasi.

Direktor Jenral Perimbangan Kuangan. Dana Alokasi Umum DAU, dilaksanakan seiring dengan pelaksana otonom daerah sejak adanya Undang-Undang N0 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai telah dihuba dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provensi dan Kebupaten/kota Tahun Anggaran 2011, Presiden memutuskan dan menetapkan peraturan DAU pasal 1 yang berbunyi demikian. a.) Dana Alokasi Umum dalam peraturan presiden ini adalah Dana Alokasi Umum

sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011. b.) Dana Alokasi Umum terdiri dari 1.) Dana Alokasi Umum untuk provensi, 2.) Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota, 3.) Dana Alokasi khusus DAK.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana APBN yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Memperhatiakan ketersedian dana dalam APBN berati, bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastiakan setiap tahunnya.

Dana alokasi khusus digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan parasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharan parasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun.

2. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukino (1994) pertumbuhan ekonomi *(Economy Growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam produksi masyarakat. masalah pertumbuhan perekonomi yang menyebabkan barang dan jasa yang ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi memperoduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan, pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya.pertambahan memperodusinya sering kali lebih besar dan pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya dengan demikian perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya.

Sadono Sukino (1996), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki difinisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi bersarnya makin tinggi pada kesejateraan masyarakat meskipun terdapat indicator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Simon Kozunet dalam Todaro (2000). Mendefinisihkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara sebagi kemampuan Negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada

kemajuan teknologi dan kelembagaan serta ideology terhadap berbagai keadaan yang ada.

Lincolin Arsyad (1999) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berati, perubahan yang terjadi terus menerus usaha untuk menaikkan pendapatan perkepitan, kenaikan pendapatan perkepitan harus terus berlangsung dalam jangka penjang yang terakhir perbaikan system kelembagaan disegalah bidang misalnya, ekonomi politik, hukum social, budaya, sisitem ini bisanya ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (intitusi) dan perbaikan dibidang regulasi baik legal maupun informasih. Dalam hal ini berapa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu Negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkepitan, dengan demikian sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah dan semua elemen yang terdapat dalam suatu Negara untuk berparatipasi aktif dalam proses pembanguanan.

Todaro (2000), dari berbagi teori komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi ketiganya adalah.

a.) Akumulasi modal yang meliputih semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tana peralatan hasil, fisik dan modal atau sumber daya manusia. b.) Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja kemajuan teknologi.

Fitra Afriza (2012) pembagunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (eguity), dan keberlanjutan (sustainbilly). Pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelengkapan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya menusia, peralatan dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif. Pemerataan (eguity) dalam hal ini mempunyai impilkasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang di peroleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan. Berkelanjutan (sustainability) sedangkan tujuan berkelanjutan pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui system pasar maupun diluar system pasar harus tidak melampaui kepasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar dengan potensi dan prioritas daerah. untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, social, budaya dan pertahanan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Sebagai teori yang dikemukankan oleh Rahardjo Adisasmita (2014), dalam

bukunya menyatakan bahwa ada beberapa indicator yang dapat di jadikan sebagai tidak ukur untuk meliat pertumbuhan ekonomi satu wilayah adanya sebagai berikut.

a. Ketidak Seimbangan Pendapatan

Dalam keadan yang ideal dimana mendapatkan dengan mutlak distribusikan secara adil 80 persen populasi terbahwa akan menerima 80 persen dan total pendapatan sedangkan 20 persen populasi terbatas, menerima 20 persen total pendapatan. Menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi terbatas, indicator ketidak seimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Sektor Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju pembangunan ekonom yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan steruktur perekonomian, dimana terjadi kecendungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industry akan meningkat, sektor industry memiliki peranana sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industry dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dan

exper. Oleh karna itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor petanian, tetapi harus pada pulah di orientasikan kepada sektor industry.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang sterategis dan sangat mendesak dalam pembanguna di Indonesia penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa tingkat penganguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat kerisis financial Negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut diperlukan peranan pemerintah.

Salah satu langka sterategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau keseluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagi komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputih tanaman pangan, perkebunan, perikanan, perternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industry pembangunan prasaranan dan sarana trsafortasi akan menunjang perkembangannya berbagai kegiatan di sektor-sktor lainnya (pertanian, perdagangan, industry, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini kemudahan diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandan, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan sebaginya). Maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik,air bersih, dari jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya.

e. Produk Domestic Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi. Salah satu indicator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Menurut defenisi PDRB adalah jumlah seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikian. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikkan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Badan Pusat Statistic (BPS) http://sidrapkota bps.go.id PDRB dapat diperoleh melaluhi tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

PDRB pedekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh bagian unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokan menjadi Sembilan sektor lapangan usaha. a.) Pertanian, b.) Pertambangan dan penggalian, c.) Industry pengelolah, d.) Listrik,gas, dan air bersih, e.) Bangunan dan kontribusi, f.) Perdagangan, hotel dan restoran g.) Penganguktan dan komunikasi, h.) Jasa keuangan, dan jasa perusahaan, j.) Jasa-jasa lainnya

2. Pendekatan Pengeluaran

   PDRB pendekatan, pengeluaran adalah jumlah semua komponen pemerintah akhir dari: a.) Pengeluaran komsumsi rumah tanggah dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba), b.) Komsumsi pemerintah, c.) Pembentukan modal tetap demostik bruto (invstasi) dalam jangka, d.) Waktu tertentu (biasanya satu tahun), e.) Pembentukan stok, f.) Ekspor netto (eksport dikurang impor).

3. Pendekatan Pendapatan

   PDRB pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterimah oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut

sebelum dipotong pajak. Penghasilan dan pajak langsung lainnya dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (sektor).

PDRB mengunakan pemakaian data hasil perhitungan PDRB yang di bentuk menurut sektor ekonomi lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua bentuk yaitu. a.) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengambarkan nilai barang dan jasa yang dihitung mengunakan harga berlaku pada tahun berjalan, b.) Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengambarkan jumlah nilai tambahan barang dan jasa yang dihitung mengunakan harga pada tahun tertentu digunakan yang sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi satu wilayah di peroleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga kostan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi) dengan penyayian ADHB ini pertumbuahan ekonomi riil dapat dihitung yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

B Penelitian Terdahulu

Lia Nazliana Nasution (2008) menyimpulkan dalam penelitiannya kontribusi dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota Sumatra

Utara di era otonom daerah. dengan teknologi analisis mengunakan metode data panel mengemukakan bahwa variabel dan perimbangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel PAD dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota sumatara utara. (*http://www.share.net/Lia/pdf*).

Hidayat dkk (2007) menganalisis penelitian yang *berjudul analysis Of Financial Perfomance Of Newly Created Regencies/Cities In north Sumatara,* yang bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten/Kota hasil di Sumatera hasil pemerkaran. Hasil penelitian menunjutkan bahwa sebagaian besar kabupaten/kota hasil pemerkaran memiliki ketergantungan khusus DAU dan DAK. *(http://www.share.net/hidayat/pdf).*

Kusmadewi (2010) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dana perimbangan, investasi swasta, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hubungan antara dana perimbangan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi tergolong kecil. *(www.slideshare.net/yulian/junal).*

Yulian Rinawaty (2009) menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi Sulawesi Tengah, mengemukakan bahwa dana perimabangan secara keseluruhan yang melibatkan komponen-komponennya yaitu antara

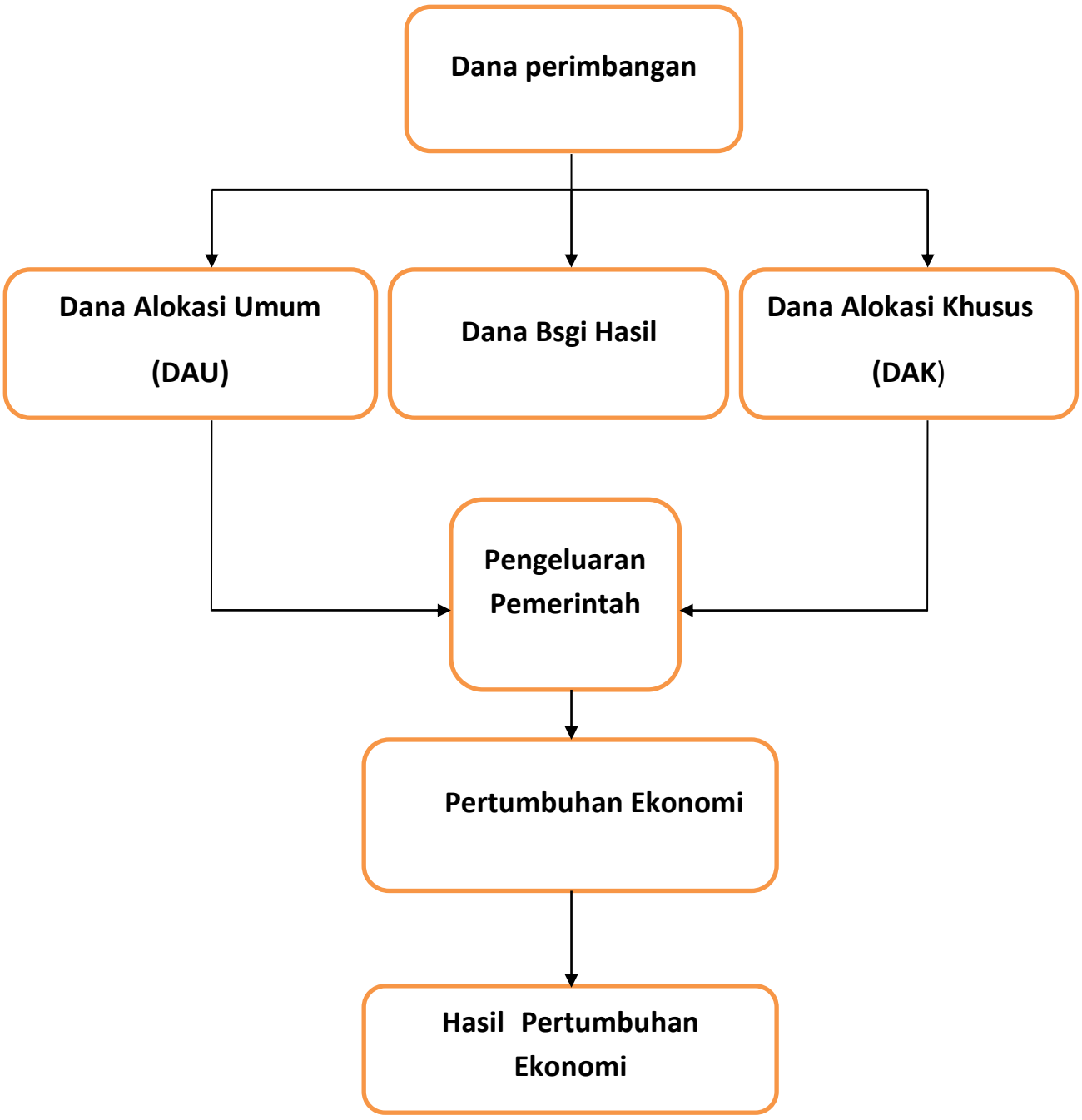
lain DAU, DAK, DBH berpengaruh positif dengan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi wisata.

C. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang di bahas dalam penelitian ini, hipotesis yang akan dikaji adalah.

A. Bagaimana kontribusi dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
B. Apa jasa faktor-faktor penghambat dalam pengelolahan perencanaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Karangka Berpikir



(Gambar 1.1)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitaian

   Penelitian ini laksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang di mana titik pengambilan data penelitian di kantor (BAPPEDA) Kota Sidenreng Rappang.

2. Waktu penelitian

   Sesuai dengan jadwal penelitian yang telah direncanakan, maka penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan, dari 23 Desember sampai Januari 2021

B. Populasi dan Sampel

Adapun bentuk penelitian yang dilakukan penelitian ini yaitu;

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilandasarkan didaerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengelolah data, dan menganalisis data-data yang diperoleh serta menarik kesimpulan dari hasil Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Observasi

   Observasi adalah pengumpulan data dengan cara menadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informal. Teknik ini menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Dokumen

Teknik ini dilakukan telah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari peneliti sebelumnya berupa buku dan jurnal.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desantralisasi.

b. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desantralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

c. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus atau DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah atau pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Penelitian Lapangan
   a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen berupa pencatatan dan referensi serta laporan tertulis.

b. Interview yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau diskusi secara langsung dengan pihak yang dianggap berkompoten terkhususnya pada bagian akuntansi untuk memberikan data dan informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder
   a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
   b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada
2. Sumber data yang di gunakan yaitu person, place, dan paper
   a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau tanya jawab.
   b. Place, yaitu tempat dimana data tersebut diperoleh, tempat penelitian yang dimaksud adalah badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
   c. Paper adalah catatan, surat atau dokumentasi yang dapat digunakan sebagai data sekunder dalam mendukung penelitian yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Sugiyono (2012) mendefinisikan metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

1. Reduksi Data

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang teah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2012).

2. Penyajian Data

   Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian

kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam uraian naratif, bagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi akan merencanakan kerja sebelumnya (Sugiyono, 2012).

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelum ditetapkan menjadi Kabupaten Sidrap atau lebih akrab disingkat Sidenreng Rappang memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV. Di samping kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Gowa, dan Wajo. Berbagai literature yang ada menyebutkan, eksistensi kerjaan ini turut memberi warna dalam percaturan politik dan ekonomi kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan.

Sidenreng merupakan salah satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam kitab La Galigo yang amat melegenda sementara masa La Galigo, menurut Christian Pelras yang menulis buku manusia bugis, berlangsung pada priode abad ke 11 dan 13 masehi ini berate sidenreng merupakan salah satu kerajaan kuno atau pertama di Sulawesi Selatan

Rappang disebutkan sebagai kerajaan yang menguasai daerah hilir sungai saddang di abad 15 M. Bersama dengan Sidenreng Rappang. Sawitto, Alitta, Suppa dan Bacukki. Mareka membentuk persekutuan Aja Tappareng (Wilayah barat danau) untuk membendung dominasi luwu. Persekutuan itu kemudian diikatkan dalam perkawinan antara keluarga raja-raja mereka.

Dalam perjalanan. Kerajaan sidenreng dan Rappang mengalami pasang surut pemerintah. Hingga pada tahun 1906 kedua kerajaan yang ketika itu di perintah La Sadapotto, addaluang, Sidenreng XII sekaligus Arung Rappang XX akhirnya di paksa tunduk kepada kolonial belanda setelah mulai perlawanan yang sengit. Wilayah kedua kerjaan ini kemudian berstatus distrik dalam wilayah onderafdeling parepare.

Onderafdeling Sidenreng Rappang di bawa pemerintahan Controleur yang berkedudukan di Rappang dengan membawahi wilayah admistrasi daerah adat yang disebut Ragen. Keadaan ini berlangsung hinga masa penduduk jepang yang pada masa itu berada di bawah pengawasan Bunken Kanrikan.

Seiring fajar kemardekaan yang menyising pada 17 Agustus 1945, gelora semangat persatuan Indonesia tak terbendung lagi maka dengan dudukan penuh seluruh masyarakat, sidenreng Rappang menyatakan diri sebagai bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika parepare menjadi daerah swatanra Tingkat II berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang didalamnya terdapat Swapraja Sidenreng dan swapraja Rappang yang berotonomi sebagai lembaga pemerintahan adat berdasarkan staatblat 1938 nomor 529.

Keputusan mentri dalam negri nomor U.P 7/73-374 tentang 28 januari 1960 yang menetapkan Andi Sapada Mappangile sebagai Bupati Kepalah Daerah tingkat II Sidenreng Rappang yang pertama

pada 18 Februari 1960. Andi Sapada Mapangile kemudian di lantik sebagai Bupati oleh Gubernur Kepalah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Atas dasar pelantikan Bupati maka di tetapkan tanggal 18 Februari 1960 sebagai hari jadi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diperingati setiap tahunnya.

Sejak itu berakhir sudah pemerintahan feudal para bangsawan menurung yang telah berlangsung berabad-abad namun yang jauh lebih penting adalah tumbuhnya rasa kebangsaan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki persamaan hak dan derajat. Keberhasilan panen padi di Sidenreng karna ketegasan nenek Mallomo dalam perjalanan hukum hal ini terlihat dalam budaya masyarakat setempat dalam menentukan masa tahanan melalui musyawarah yang disebut (tudang sipulung = duduk, sipulung = berkumpul atau terjamahkan sebagai suatu Musyawarah Besar) yang dihadiri oleh para pallontara ahli mengenai buku lontara dan tokoh-tokoh masyarakat adat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Daerah

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
d. pelaksanaan administrasi badan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
d. Permantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia;
d. permantauan,evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;
d. permantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan

kebijakan operasional di bidang penelitian dan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah.
i. pelaksanaan fungsi lain yang diperitahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

8. Bagian Kesatu Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

9. Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Fungsional serta seluruh personil dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai ketentuan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

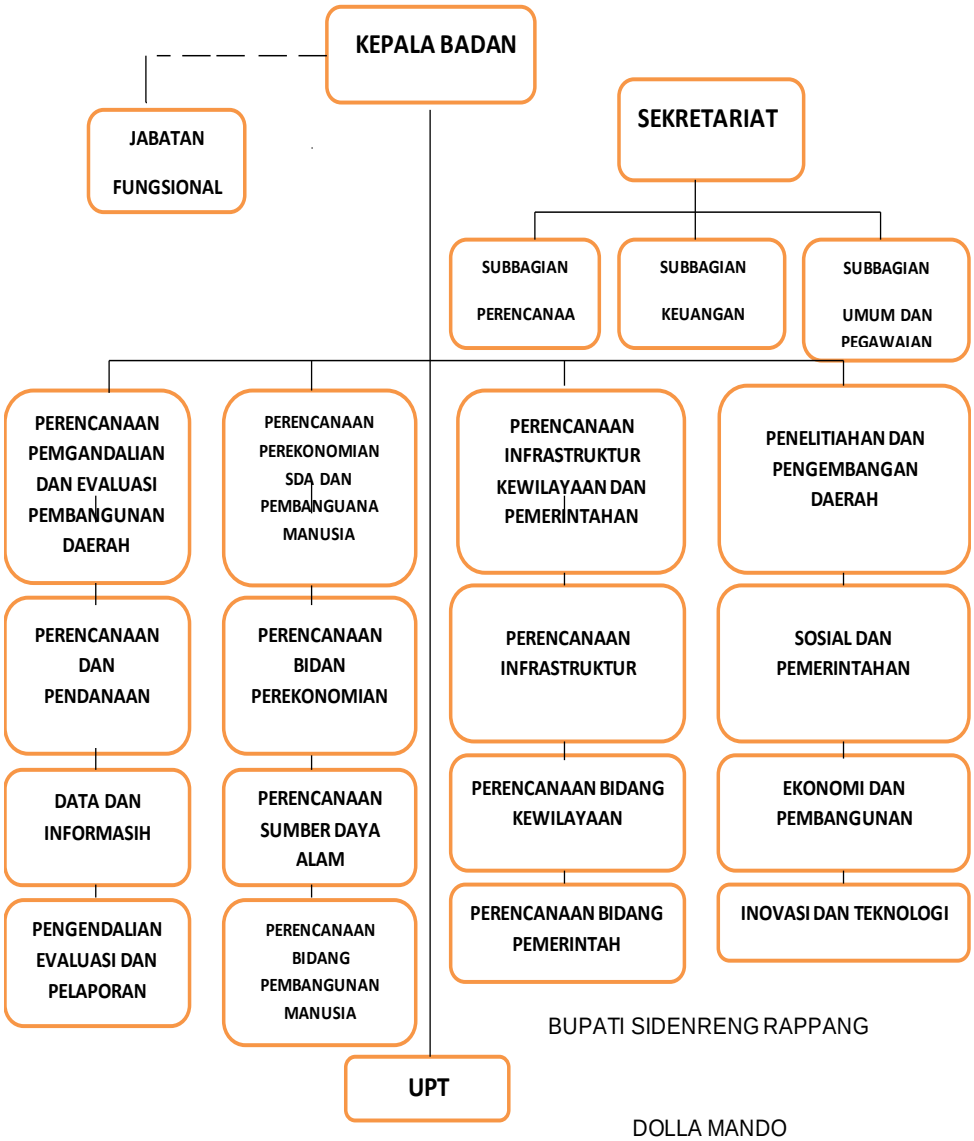
Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

C. Struktur Organisasi Dadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Adapun susunan organisasi badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Gambar. 1.1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

DOLLA MANDO

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi data penelitian

Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki serta kemampuan daerah itu sendiri. Dengan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antara tahun. Dapat diketahui seberapa besar pertumbuhan yang terjadi akibat adanya aktifitas perekonomian selama kurun waktu tertentu pada wilayah tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pembangunan selama ini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menunjukan hasil mengambirakan. Tetapi fakta dilapangan data PDRB dalam lima tahun terakhir justru pertumbuhan fluktualitif. Hal ini tersebut dapat diliat dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2015 sampai ke tahun 2019 PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dimana pertumbuhan PDRB tahun 2016 sebesar 7,09 persen tertiggi lima tahun tahun terakhir. Tetapi tahun 2016 pertumbuhan PDRB terus mengalami penurunan, pada tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pertumbuhan PDRB terendah selama lima tahun

terakhir sebesar 4,65 persen. rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun adalah 0,59 persen.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Sidenreng Rappang. Khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelolah data pertumbuhan ekonomi, dan dana perimbangan, pemerintah K abupaten Sidenreng Rappang selama 2015-2020, maka skripsi dari penelitian adalah sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Ekonomi

   Salah satu cara untuk menilai kemajuan perekonomian suatu daerah adalah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya.

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang di produksi dalam satu tahun disuatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tetapi lebih nenekankan pada keberadaan produksi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang sebagai tolak ukur dalam penelitian ini melalui Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) harga konstan di daerah yang akan diteliti.

Dalam table berikut bisa menjelaskan progresif ditunjukkan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabe. 5.1
Produk Domestil Regional Bruto
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADH Konstan (juta Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi
2016	**7.182.787.48**	8,77
2017	**7.693.463.16**	7,09
2018	**8.075.027.24**	5,02
2019	**8.450.694.49**	4,65
2020	**8.401.055.18**	0,59

Sumber ; BAPPEDA, Kabupaten Sidenreng Rappang (Data diolah)

Dalam penyajian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satu dibedakan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur partumbuhan ekonomi, karna nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), harga konstan tidak di pengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga berlaku untuk melihat besarnya ekonomi dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurung waktu tujuh tahun terakhir menunjutkan trend yang terus menerus mengalami pelambatan, yaitu dari level 7 persen menembus 0 persen pertumbuhan tertinggi yang dicapai yaitu sebesar 7,09 persen pada tahun 2017 rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu lima tahun adalah 8,7 persen.

Gambar.1.2

Grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten sidrap tahun 2016-2020



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang

Perhitungan PDRB mengunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan, PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat setiap tahunnya (series tahun 2016 sampai dengan 2019), namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, hal ini bisa diketahui dengan melihat perhitungan PDRB mengunakan harga konstan yaitu terjadi penurunan PDRB Kabupateng Sidenreng Rappang tahun 2020 sebesar 0,59 persen dan bilah dilihat dari perhitungan harga berlaku terjadi kenaikan 1,29 persen dari tahun 2020.

Untuk meliat kontribusi setiap sektor ekonomi dapat diliat pada tabel diatas sebagai berikut.

Tabel .5.2

Persentase Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Belaku PER sektor Ekonomi Kota Sidrap Tahun 2011-2020

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,75	1,85	4,44	3,08	9,13	-7,67	6,72	15,02	8,56	0,01
Industri Pengolahan	17,04	14,23	9,80	9,56	9,59	8,30	4,10	1,10	3,72	-1,70
Informasi dan Komunikasi	10,81	17,81	13,82	10,44	11,14	7,73	7,64	11,75	12,10	10,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	9,55	8,73	9,69	9,06	10,91	4,92	10,97	8,80	9,03
Jasa Keuangan	14,77	14,63	12,41	6,44	9,31	16,67	5,48	3,78	1,60	5,75
Jasa lainnya	7,44	8,36	5,00	7,06	7,55	7,89	9,68	12,64	9,90	-3,21
Jasa Pendidikan	8,53	7,38	8,09	3,57	6,11	5,55	5,10	9,90	9,10	3,28
Jasa Perusahaan	10,25	9,84	9,67	6,94	5,64	8,21	6,40	11,11	13,16	-2,82
Konstruksi	9,62	9,84	10,42	3,97	9,32	9,24	9,89	8,40	8,42	3,16
Pengadaan Air	9,52	4,61	5,38	2,16	0,33	3,22	9,41	8,44	1,33	2,14
Pengadaan Listrik, Gas	13,45	12,22	8,58	13,39	-1,94	12,49	6,16	6,94	8,09	5,31
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	6,26	6,20	5,90	7,07	5,53	9,05	18,49	17,56	-4,63
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,51	11,16	6,45	7,63	6,81	6,94	7,79	9,12	8,35	-2,67
Pertambangan dan Penggalian	8,50	17,27	9,30	14,52	9,62	12,34	12,66	9,32	9,10	2,77
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,45	5,84	3,46	9,35	6,63	12,19	7,11	-0,04	-1,38	-4,01
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9,63	8,93	6,93	7,87	8,03	8,81	7,11	5,02	4,65	-0,59
Real Estate	8,16	7,83	7,77	7,28	7,72	5,04	5,74	5,64	5,86	0,88
Transportasi dan Pergudangan	8,16	8,16	8,45	10,57	11,80	5,66	5,39	13,82	15,13	-8,55

sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sidrap

Dalam data diatas tercatat bahwa sektor ekonomi yang tinggi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 adalah sektor jasa lainnya 9,90 persen peringkat kedua diduduki sektor akomodasi dan maka dengan angka pertumbuhan ini riil mencapai 9,90 persen. Peningkatan ke tiga adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 8.80 persen

peningkatan keempat adalah sektor perdagagan sebesar dan eceran sebesar 8,35 persen.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *block grant* (yang memberi diskresi kepada daerah untuk mengunakan dana yang di terima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (yang membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya). Komponen Dana Perimbangan mencakup bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel. 5.3
Pertumbuhan Dana Perimbangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019

Tahun Anggaran	Dana Perimbangan	Pertumbuhan Dana Perimbangan
2015	**779,795,679,000.00**	8,03
2016	**1,140,579,906,000.00**	8,77
2017	**1,038,591,661,000.00**	7,09
2018	**917,199,465,000.00**	5,02
2019	**963,649,904,000.00**	4,64
2020	**830,165,777,000,00**	-0,54

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang (Data diolah)

Selama periode tahun 2015-2020, laju pertumbuhan ekonomi Dana Perimbangan m engalami fluktuasi, pada tahun 2016 mengalami

laju pertumbuhan tertinggi jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pertumbuhan sebesar 8,77 persen, sedangkan Pertumbuhan Dana Perimbangan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,54 persen.

Tabel.5.4
Perkembanagan Dana Perimbangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2020

Tahun Anggaran	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	%
2015	**779,795,679,000.00**	**101,304,105,000.00**	7,69
2016	**1,140,579,906,000.00**	**132,582,303,650.00**	8,60
2017	**1,038,591,661,000.00**	**163,408,876,000.00**	6,35
2018	**917,199,465,000.00**	**167,491,056,000.00**	5,47
2019	**963,649,904,000.00**	**143,444,241,000.00**	6,71
2020	**830,165,777,000,00**	**231,609,769,616,87**	-0.54
rata-rata			35,36

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahan Dana Perimbangan sangat mempengaruhi total pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun. Walaupun Kontribusi Dana Perimbangan terdapat Pendapatan Daerah menunjukkan angka yang berfluktuatif dimana pada tahun 2015 sebesar 7,69 persen, tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 8,60 persen sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,35 persen, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 5,47 persen, sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,71 persen proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 6,71 persen, rata-rata Kontribusi Dana Perimbangan terdapat pendapatan daerah selama tahun penelitian sebesar 34,82 persen. dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pemerintah pusat masih tinggi.

B. Pembahasan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk alokasi baik yang bersifat *block grant* (yang memberi dikresi kepada daerah untuk mengunakan dana yang di terima sesuai dengan kepentingan daerah sendiri) maupun yang bersifat *specific grant* (yang membatasi kebebasan daerah dalam menggunakan dana yang diterimanya). Komponen Dana Perimbangan mencakup bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama periode tahun 2015-2020, laju pertumbuhan ekonomi Dana, pada tahun 2016 tertinggi jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pertumbuhan sebesar 8,77 persen, sedangkan Pertumbuhan Dana Perimbangan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,54 persen.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pembangunan selama ini yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menunjukan hasil mengambirakan. Tetapi fakta dilapangan data PDRB dalam lima tahun terakhir justru pertumbuhan fluktualitif. Hal ini tersebut dapat diliat dari besarnya nilai

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2015-2020, PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pertumbuhan cukup signifikan dimana pertumbuhan PDRB tahun 2016 sebesar 7,09 persen tertinggi lima tahun terakhir. Tetapi tahun 2016 pertumbuhan PDRB terus mengalami penurunan, pada tahun 2018 Kabupaten Sidenreng Rapang mengalami pertumbuhan PDRB terendah selama lima tahun terakhir sebesar 4,65 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu lima tahun adalah 0,59 persen.

Dari tabel di atas dapat diterangkan bahan Dana Perimbangan sangat mempengaruhi total pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun. Walaupun Kontribusi Dana Perimbangan terdapat Pendapatan Daerah menunjutkan angka yang berfluktuatif dimana pada tahun 2015 sebesar 7,69 persen, tahun 2016 mengalami peningkitan menjadi 8,60 persen sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,35 persen, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 5,47 persen, sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,71 persen proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 6,71 persen, Rata-rata Kontribusi Dana Perimbangan terdapat pendapatan daerah selama tahun penelitian sebesar 34,82 persen. dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pemerintah pusat masih tinggi.

Hasil penelitian yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (BAPPEDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengelola data pertumbuhan ekonomi, dan dana perimbangan, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2015-2020, maka deskripsi dari penelitian pertumbuhan ekonomi Salah satu cara untuk menilai kemajuan perekonomian suatu daerah dengan mencermati nilai dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat tahun tertentu dibandingkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang di produksi dalam satu tahun tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor-faktor produksi, tetapi lebih penekankan pada keberadaan produksi. Pertumbuhan ekonomi yang sebagai tolak ukur dalam penelitian ini melalui Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) harga konstan di daerah yang akan diteliti.

Dari hasil tersebut dapat dikatakan pada pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang karna lebih dominan oleh Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum untuk menutupi belanja daerah hal ini disebabkan oleh keterbatasan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengurangi potensi yaitu

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperbaiki karakter atau moral pengelola Pendapatan Asli Daerah sistem penagian dan pendapatan dalam pemugutan Pendapatan Asli Daerah. serta melakukan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain

Penelitian yang mengunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan suatu daerah, semakin tinggi anggaran yang dibutuhkan dan semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. setiap tahun pada pemerintah daerah se-Ajjatapareng tingkat, ketergantungan pada Dana Perimbangan mengalami peningkatan di karenakan pendapatan asli daerah tidak bisa dimaksimalkan setiap tahun oleh pemerintah daerah merspon belanja daerah. Dana Perimbangan digunakan banyak dari pada Pendapatan Asli Daerah karna jumlah Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah di Ajjatapareng dari tahun 2015-2020 lebih besar 5 kalin dari pada jumlah Pendapatan Asli Daeah bahkan di Kabupaten Wajo dan kabupaten Parepare pada tahun 2016 Dana Perimbangannya yang lebih besar 10 kali lipat dari pada pendapatan asli daerahnya hal ini dikarenakan tinggi belanja pegawai jadi dana perimbangan yang dikirim oleh pemerintah pusat juga menjadi besar.

Terjadi karna Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah lebih banyak menggunakan Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sudah memang menjadi hal pokok bagi pemerintah daerah karna belanja

daerah terbagi 3 belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja, barang belanja, modal tanah, belanja modal peralatan, dan mesin, belanja modal gedung, dan lain-lain dan terakhir belanja tak terduga, adapun pemerintah merespon belanja daerah mareka dengan melakukan belanja operasi dulu yakin belanja pegawai.

Pemerintah daerah memenuhi belanja daerahnya dengan mengunakan Dana Alokasi Umum lebih banyak dari pada Pendapatan Asli Daerah jumlah Dana Perimbangan yang di terima pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015-2020 lebih besar 5 kali lipat dari pada jumlah Pendapatan Asli Daerahnya. Belanja Daerah tahun 2015-2020 di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Meningkatnya setiap tahun Belanja Daerah karena jumlah kegiatan yang meningkat juga, ketergantungan dengan pemerintah pusat tidak bisa dipungkiri akan tetapi walaupun Belanja Daerah mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerahnya juga meningkat terjadi karna kegiatan Pemerintah Daerah meningkat sehingga potensi daerah mareka tidak bisa di maksimalkan karna potensi Daerah dimaksimalkan akan membebani rakyat.

Digunakan Dana Alokasi Umum terlebih dahulu dari pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang karna Pendapatan Asli Daerah digunakan, terlebihi dahulu masuk ke dalam kas daerah yang biasanya Pendapatan Asli Daerah masuk ke bulan keempat pada tahun periode berjalan. Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum meningkat dalam setiap tahun di Kabupateng Sidenreng Rappang bagitupun belanja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya. Fenomena terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan oleh kegiatan Belanja Pemerinta Daerah diawali dengan menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Umum yaitu belanja pegawai.

Peningkatkan Belanja Daerah tahun berikutnya karna Dana Alokasi Umumnya juga mengalami peningkatan tiap tahun. karna belanja pegawai juga meningkat sehingga *flypaper effect* meningkatkan belanja daerah tahun berikutnya.

Setelah diliat dari sudut pandang yang berbeda bukan mengunakan analisi statistik melihat lebih pada mengamati dan mewawancarai pengunaan anggaran akan berbeda hasilnya. Metode deskristif kualitaitif memastikan terjadi pada belanja daerah. terjadi karna dana perimbangan digunakan untuk belanja daerah dari pada pedapatan asli daerah. hal tidak bisa dihindari karna pemerintah daerah dituntut untuk mengunakan dana perimbangan, karna belanja operasi dianggarkan untuk mengunakan Dana Alokasi Umum, hal ini untuk melaksanakan Belanja pegawai atau membayar gaji pewai negeri sipil, ketika Dana Alokasi Umum tidak dipergunakan proporsinya masing-masing akan berdampak kepada opini badan pemeriksa keuangan tidak sesuai dengan ketentuannya.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditarik kesimpulan bahwa.

1. Telah terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2015-2020, Dana Perimbangan dalam hal ini, Dana Alokasi Umum digunakan terlebih dulu untuk Belanja Daerah dibandingkan pada Pendapatan Asli Daerah. Tidak bisa dihindari disebabkan Pemerintah Daerah untuk mengunakan Dana Alokasi Umum untuk Belanja Daerah. Pemerintah merespon Belanja Daerah dengan melakukan belanja operasi yakin Belanja Pegawai, Belanja Pegawai dianggarkan untuk melaksanakan pembayar gaji pegawai Negeri sipil.
2. Hal ini menyebabkan Belanja Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat setiap tahun mulai dari tahun 2015-2020 dan di tahun 2018-2020 mengalami penurunan disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengalami penurunan disebabkan terjadi situasi masalah yang muncul covid 19, maka Dana Alokasi Umum yang diterima tidak terlalu banyak yang diberikan oleh Negara.

B. Saran

Di harapakan pemerintah fokus pada pembiayaan program-program kesehatan, social, serta kemiskinan, untuk mengingat sekarang Dana Perimbangan mengalami penuruna pada tahun 2019-2020 dengan adanya situasi masalah yang muncul yaitu

covid 19 maka hal ini pemerintah patut untuk memperhatikan masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Wahid. 2010. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kebupaten Dan Kota Provensi Jawa Tengah)* Skripsi, Porgram Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Barawijah.

Algifari 2000. *Analisis Regresi, Teori Kasus dan Solusi*, BPFE UGM. Yogyakarta.

Boediono,1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE,* Yogyakarta. Gujarati,

Budianto dan Stanly W, A. 2016.*Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Akuntansi. Vol 4, No 4.*

Damodar,1995, *Ekonometrika Dasar, Alih Bahasa Sumarno Zain,*

Director Jendral Perimbangan Keuangan, *Alokasi DAU Dilaksanakan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonom Daerah*. Tanggal 24 Maret 2020 pukul 14:30 *http://www.djpk.kemenkeu.go.id?page* id=276.

Erlangga*, Jakarta Mankiw, Gregory N.1999. Teori Makro Ekonomi, edisi*

Fitra Afrisa, 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Di Provensi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2001-2011*, Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Fujiati, Amin. 2007. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karasidena Semarang Era Desentralisasi Fiscal. *Jurnal Konomi Pembangunan. Vol. 12 No. 3, desember 2007: hal 61-70,*

Indra sosila.Yolamalinda, "*Rian Hidayat 2010, Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Sumatra Barat".*

Jhinghan, ML. 2000. Ekonomi *Pembangunan dan Perencanaan.* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Kusumadewi. 2010. *Pengaruh Dana Perimbangan, Invesyasi Swasta. Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Artikel diakses tanggal 17 januari 2020 pukul 15:00, *http://www.google,net/kusumadewi/jurnal).*

Lia Nazliana Nasution (2008), *Pengaruh Dana Derimbangan Dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Sumatera Utara*

Di Era Otonomi Daerah. artikel diakses tanggal 10 januari 2020 pukul 12:30. *(http://www.slideshare.net/fnasliana/jurnal).*

Lincolin Arsyad. 1991*. Ekonomi pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.

Peraturan Presiden Repubelik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provensi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2011.

Rahardjo Adisasmita, 2014 *Pertumbuhan Wilaya Dan Wilayah Pertumbuhan.* Yogyakarta Graha ilmu.

Sadono, Sukino. 1996. Pertumbuhan Ekonomi Makro. Jakarta; PTY. Raja Grasindo.

Syarifin, Pipin (2005*) Pengaruh Dana Hasil Pajak Dan Dana Dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Kabupaten Dan Kota di Sumatara".*

Todaro, Michael. 200. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketig.* Jakarta Erlangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999. *Tentan*g *Pemerinbtrah Daerah* www.djpk.kemenkue.go.id Tanggal 24 Maret 2021

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. www.djpk.kemenkue.go.id

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No.25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah.*

Yulian Rinawaty dkk (2009), *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Daerah Provensi Sulawesi Tengah*, artikel diakses tanggal 14 januari 2020 pukul 16:00 (www.slideshare.net/yulianrianawaty/jurnal)